

Bagian Keenam

DISKUSI PENUTUP

(Ketika Antropologi Harus Membaca Isu Kekuasaan)

“Antropologi dan ilmu sosial lain sering menghadapi masalah yang tersodorkan atas nama kepentingan dan keprihatinan masyarakat luas. Sementara itu, dalam kenyataannya disiplin-disiplin tersebut tidak memiliki alat-alat konseptual dan analisa yang memadai untuk memecahkan..”.

-- Kaplan dan Manners (2002:40) --

MEDIA pada dasarnya telah memberi kontribusi cukup banyak dalam pengkajian tentang pengetahuan suatu masyarakat. Kontribusi media terhadap pengkajian tentang pengetahuan suatu masyarakat dapat ditandai dari strategi dan kepentingan yang dikembangkan media itu sendiri. Dalam mengembangkan strategi dan kepentingannya, terbentuklah identitas-identitas yang kemudian diposisikan menjadi para pelaku media. Posisi para pelaku pada dasarnya telah ditentukan oleh suatu struktur atau bentuk pengorganisasian demi kepentingan media itu sendiri. Atau dengan kata lain, identitas-identitas yang telah diorganisasi dan dikonstruksi menjadi aktor-aktor yang secara kongkret terlibat dalam arus kontinyu tindakan tersebut, pada dasarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan yang terus berkembang pada diri media. Jika dalam mengembangkan kepentingan media, para pelaku melakukan tindakan saling mendukung, saling mengontrol, saling bersaing, dan saling mengalahkan, maka hal itu dapat dipahami sebagai proses pembentukan pengetahuan yang melekat di dalamnya. Serangkaian proses pembentukan pengetahuan itulah yang

kemudian memberi ruang bekerjanya kekuasaan. Sebab, tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak kekuasaan tanpa pengetahuan.

Tak terkecuali dengan sajian acara televisi – khususnya program tayangan *infotainment* – yang merupakan produk dari industri media dalam topik kajian ini, pada dasarnya telah menandai proses pembentukan pengetahuan. Sajian acara televisi tersebut pada dasarnya tidak hanya dilihat dari bentuk-bentuk tekstual semata, ia tersaji lantaran praktik-praktik sosial para pelaku yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sejalan dengan pengetahuan dan identitas-identitas kultural secara luas. Tersajikannya acara televisi tersebut pada dasarnya melalui proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi pengetahuan para pelaku yang terlibat, yang kemudian diekspresikan secara tekstual. Dalam proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi pengetahuan para pelaku itulah, berlangsung kontestasi kekuasaan. Konsep kontestasi kekuasaan dalam hal ini dapat digambarkan dalam bentuk perjuangan, perebutan, dan persaingan yang seiring dengan proses pembentukan pengetahuan itu sendiri.

Baik proses pembentukan pengetahuan maupun terciptanya kontestasi kekuasaan pada dasarnya dapat dilihat sebagai bentuk kebudayaan (Foucault, 2000). Akan tetapi harus disadari bahwa kekuasaan akan terus mengalir ke sejumlah institusi dan struktur, sehingga kekuasaan tidak dapat diartikan sebagai suatu struktur yang mantap (Foucault, 1980). Ia justru akan selalu berubah sejalan dengan interaksi yang berlangsung secara terus-menerus – baik berupa perjuangan, perebutan, maupun perdebatan – serta berkembangnya pengetahuan para pelaku. Artinya, kekuasaan akan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap dalam seluruh jalinan

hubungan sosial. Meresapnya kekuasaan dalam seluruh jalinan hubungan sosial pada dasarnya merupakan ungkapan-ungkapan kebudayaan, sedangkan kebudayaan merupakan bentukan dari relasi-relasi kekuasaan (Wolf, 2002).

Menyimak sejumlah pernyataan tersebut, isu kekuasaan dan kebudayaan menjadi tema penting untuk didiskusikan dalam perspektif antropologi. Bahkan, menurut Saifuddin (2005:397), kajian antropologi saat ini tampak menjurus pada pemikiran neo-fungsionalisme yang memandang kebudayaan sebagai reduksi dari praktik-praktik sosial manusia – baik bertolak dari peran maupun status yang dimainkan -- dalam rangka mempertahankan dan meruntuhkan relasi kekuasaan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang mengkaji tentang manusia dan kebudayaan itu, harus membaca isu kekuasaan? Bagaimana citra antropologi yang selama ini lekat dengan hal-hal yang sifatnya eksotik, masyarakat berskala kecil, dan homogen, harus mengikuti perkembangan dunia kontemporer, masyarakat yang kompleks, dan heterogen? Masih relevankah metodologi komparasi, holistik, dan observasi partisipan dalam penelitian lapangan antropologi ketika memahami suatu ruang lingkup penelitian berskala besar seperti negara-bangsa (*nation-state*)? Bagaimana antropologi yang berkaca pada pengaruh dan fungsi “tradisi”, “sistem kekerabatan”, dan “struktur sosial” – terutama yang berkembang pada pemikiran positivistik – harus mengkaji bekerjanya media yang secara terus menerus memproduksi dan mereproduksi wacana? Benarkan seperti yang dikatakan sejumlah pengamat bahwa antropolog akan

kehilangan lahan pekerjaannya setelah kebudayaan masyarakat berkembang kian kompleks dan ruang lingkup kajiannya meluas?

Sejumlah pertanyaan tersebut pada dasarnya tidak bisa dinafikan, terutama “munculnya kelompok antropolog yang lebih memilih mengundurkan diri dari dunia empiris dan mengungsi ke dalam kegiatan penyusunan metodologi yang pelik serta canggih. Seperti Levi-Strauss yang lebih memilih mendalami struktur pikiran manusia, sementara hakikat dalam konteks kebudayaan tempat pikiran itu bekerja dan mengejawantah tidak lagi dianggap penting” (Kaplan dan Manners, 2002:280).

Selain itu, di antara pengamat itu juga ada yang menilai bahwa antropologi tampak gagap membaca sejumlah fenomena yang berkembang seiring dengan momentum postmodern. Perkembangan saat ini, justru mendorong antropologi dalam ketidakpastian untuk memaparkan realitas sosial. Bahkan, perkembangan fenomena saat ini telah menciptakan krisis representasi dalam ilmu sosial (Marcus, 1987).

Menanggapi hal itu, tentu tidak ada cara lain bahwa antropologi harus terus menerus mengembangkan pendekatan dan metodologinya agar relevan dengan masalah-masalah sosial yang baru dalam masyarakat, baik tingkat lokal maupun global. Selain itu, antropolog saat ini juga harus mengevaluasi metode pengkajiannya agar ia bisa membaca subjek-subjek baru dan kekuatan-kekuatan sosial baru yang tumbuh pada dunia modern kontemporer ini. Memperkuat konsep jaringan sosial dengan bertolak dari aspek empiris yang menjadi landasan prinsipil antropologi misalnya, bisa menjadi salah satu jalan keluar menangkali kegagapan perspektif antropologi merespons krisis representasi. Dengan demikian, krisis representasi bukan merupakan satu-

satu yang menciptakan kemandekan antropologi. Kemandekan itu terjadi lantaran antropologi kurang merespons isu yang relevan dengan perkembangan saat ini (Saifuddin, 2005).

Di antara isu yang relevan untuk dikembangkan dalam kajian antropologi pada saat ini adalah isu kekuasaan. Isu kekuasaan seperti yang telah saya diskusikan terdahulu, diharapkan akan memberi kontribusi pada ranah kajian antropologi. Dengan sudut pandang bekerjanya kekuasaan yang terdistribusi ke sejumlah relasi misalnya, justru memberi peluang bagi antropologi untuk tidak “kehilangan muka” mengembangkan metodologi komparasi dan holistik dalam suatu ruang lingkup penelitian yang berskala luas. Lebih dari itu, dengan mencermati kekuasaan sebagai relasi, justru memberi kontribusi tentang pengertian *setting* tidak sekedar menunjuk tempat atau lokasi terjadinya interaksi. Dalam kaitan dengan bekerjanya kekuasaan, *setting* dipahami sebagai “sarana-sarana antara” yang mengakomodasi terjadinya interaksi tersebut. Artinya, bekerjanya kekuasaan bukan semata-mata ditentukan oleh suatu tempat atau lokasi tertentu, justru interaksi-interaksi sejumlah pelakulah yang kemudian “memperantarai” bekerjanya kekuasaan. Kalau saja dalam sebuah *setting* terdapat klasifikasi ruang (misalnya ruang redaksi, ruang editing, ruang departemen program, dll.) pada dasarnya justru menandai posisi-posisi subjek yang sekaligus menunjukkan beroperasinya “teknologi pengaturan” pada *setting* tersebut.

Istilah “teknologi pengaturan” merupakan salah satu kata kunci dalam isu kekuasaan yang dipandang sebagai relasi. Dengan kata lain, klasifikasi ruang menandai bekerjanya kekuasaan yang kemudian memberi kerangka suatu arus tindakan – baik yang disembunyikan maupun yang ditampakkan --

dari sejumlah pelaku yang terlibat di dalamnya (Barker, 2003). Lebih dari itu, “teknologi pengaturan” dalam isu kekuasaan juga akan lebih memberi kekuatan pada realitas empiris penelitian lapangan yang selama ini merupakan landasan prinsipil kajian antropologi. Bekerjanya “teknologi pengaturan” yang ditandai oleh posisi-posisi subjek yang telah ditentukan oleh suatu struktur atau bentuk pengorganisasian tertentu, pada dasarnya justru akan mempertajam analisis antropologi tentang istilah “status sosial” yang dipahami sebagai posisi (individu-individu) dalam suatu masyarakat.

Bekerjanya “teknologi pengaturan” dalam isu kekuasaan tereksresi dalam sejumlah praktik-praktik para pelaku yang selalu saling mengontrol antara pelaku pelaku yang satu dengan pelaku lainnya. Artinya, setiap individu yang berinteraksi dalam suatu masyarakat pada dasarnya menciptakan posisi-posisi yang saling mengontrol. Posisi-posisi itu bisa saja diisi oleh individu mana pun, bahkan setiap individu pada gilirannya juga kelak bisa menempati posisi yang berbeda sekaligus memainkan peran beberapa subjek yang berbeda (Foucault, 1972). Posisi subjek itulah yang kemudian menandai dinamika dan sekaligus menuntut antropologi untuk mengkaji tindakan manusia dalam rangka memahami perbedaan-perbedaan yang terwujud dalam aturan-aturan, nilai, kepercayaan dalam praktik-praktik sosial yang dikembangkan manusia itu sendiri (Pepper, 1995).

Demikian juga istilah “kontestasi” yang lazim melekat pada isu kekuasaan, justru memberi peluang bagi antropologi untuk tidak hanya terpaku pada kajian kebudayaan masyarakat dalam keadaan teratur dan mapan saja tetapi lebih merujuk pada suatu gambaran dinamis dan berubah-ubah. Istilah “kontestasi” yang dipahami sebagai suatu cerminan bermacam

hubungan kekuatan yang saling mendukung, berjuang, bersaing, dan menghancurkan tersebut, justru akan mempertajam istilah “jaringan sosial” yang selama ini dijadikan salah satu perspektif dalam kajian antropologi. Seperti yang diungkapkan Geertz (1973) bahwa jaringan sosial suatu komunitas masyarakat dengan segala kerumitan konstelasi relasional antarindividu telah memanifestasikan kebudayaan. Proses dialektika yang terjadi dalam komunitas masyarakat pada dasarnya merupakan jaringan organisme dimana setiap individu yang menjadi anggota komunitas masyarakat tersebut saling berinteraksi. “Manusia adalah binatang yang diselimuti jaringan-jaringan makna yang dirajutnya sendiri,” tulis Geertz (1975:5).

Kontribusi isu kekuasaan dalam kajian antropologi, juga dapat dilihat ketika pengertian kekuasaan dipahami sebagai “proses pembentukan pengetahuan”. Dengan menempatkan pengertian kekuasaan sebagai “proses pembentukan pengetahuan”, maka akan memberi konsekuensi pada perspektif antropologi, terutama berkenaan dengan hubungan antara struktur dan praktik sosial yang lazim menandai terbentuknya suatu kebudayaan. Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa setiap tindakan yang dilakukan salah satu pelaku pada dasarnya justru memproduksi pengetahuan baru bagi pelaku yang lain (de Certeau, 1984 dan Foucault, 1980). Hal itu berlangsung terus menerus, hingga kemudian membentuk struktur sosial berupa kaidah-kaidah, konvensi, aturan, dan norma-norma. Akan tetapi, kaidah-kaidah, aturan, dan norma-norma tersebut tidak selamanya bertahan atau mampu mengorganisasikan berbagai praktik sosial para pelaku yang terus berlangsung. Ada kalanya ia menjadi usang,

sehingga praktik sosial para pelaku – dengan kekuasaan yang melekat di dalamnya -- kemudian akan memperbaiki dan mentransformasi struktur tersebut sejalan praktik sosial yang terus berkembang. Struktur sosial adalah aturan dan sumberdaya yang terbentuk dan membentuk praktik sosial. Meminjam istilah Giddens (1984) struktur pada dasarnya struktur sosial merupakan hasil dan sekaligus sarana praktik sosial.

Bertolak dari sejumlah uraian tersebut maka pada dasarnya ada dua hal yang patut saya catat sebagai refleksi kajian ini, yaitu:

Pertama, program tayangan *infotainment* adalah salah satu sajian acara televisi (swasta) di Indonesia yang telah memberi kontribusi pada pembentukan pengetahuan yang ditandai dengan bekerjanya kekuasaan melalui praktik-praktik sosial sejumlah pelaku yang saling berkontestasi. Kontestasi kekuasaan dalam sajian acara televisi ini, dipahami sebagai suatu gambaran adanya bermacam hubungan kekuatan yang saling mendukung, berjuang, bersaing, dan menghancurkan dalam rangka proses pembentukan pengetahuan dan memproduksi wacana.

Kedua, isu kekuasaan pada dasarnya telah memberi kontribusi berharga bagi kajian antropologi, terutama ketika sejumlah pengamat mengatakan bahwa ilmu sosial tersebut telah kehilangan lahan pekerjaannya seiring dengan perkembangan kekuatan-kekuatan sosial baru yang tumbuh pada dunia modern kontemporer ini. Isu kekuasaan juga telah memberi jalan keluar bagi antropologi untuk merespons isu-isu yang relevan dengan perkembangan saat ini. Selain itu, isu kekuasaan justru memberi kontribusi berharga bagi antropologi yang selama ini mempunyai konsep jaringan sosial dan kekuatan realitas empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan.